



# LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
(693116)  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH**

# Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2025

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Palu, 23 Pebruari 2026

**Kepala Kanwil Kemenkum Palu**

**Rakhmat Renaldy**

**NIP. 197310101996031001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Palu, 23 Pebruari 2026

**Kepala Kanwil Kemenkum Palu**

**Rakhmat Renaldy**

**NIP. 197310101996031001**

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.233.786.700 atau mencapai 68,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.805.557.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.233.786.700 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-1.233.786.700, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-1.233.786.700.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-1.233.786.700 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 1.233.786.700 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87	-
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.247.900.000</b>	<b>1.233.786.700</b>	<b>98,87</b>	<b>-</b>

Palu, 27 Januari 2026  
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		-	-
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
<b>Jumlah Properti Investasi</b>		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-

Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.53	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.099.614.000	-
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	134.172.700	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.233.786.700</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(1.233.786.700)</b>	<b>-</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(1.233.786.700)</b>	<b>-</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(1.233.786.700)</b>	<b>-</b>

Palu, 27 Januari 2026  
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>Catatan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(1.233.786.700)</b>	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	1.233.786.700	-
<b>KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	-	-

Palu, 27 Januari 2026  
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy  
NIP. 197310101996031001

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis Akuntansi*

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

## **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

## **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya .....
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.805.557.000	1.247.900.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.805.557.000</b>	<b>1.247.900.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp0

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya Tidak terdapat Realisasi Pendapatan. dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Penerimaan  
Pajak Rp0

### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 Tidak terdapat Pendapatan Pajak.. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Pendapatan</b>	-	-	-
<b>Pendapatan Pajak/Bea Cukai</b>	-	-	-



## B.2 Belanja

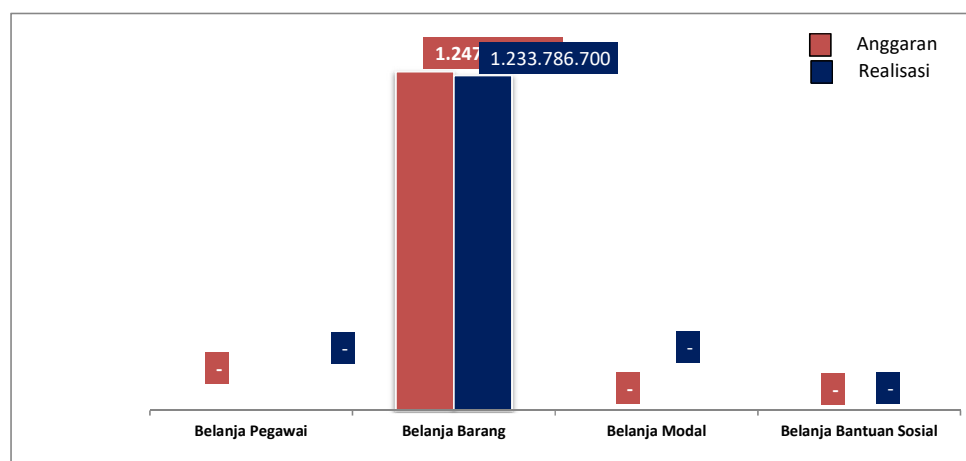
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.233.786.700 atau 98,87 % dari anggaran belanja sebesar Rp.1.247.900.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.900.000</b>	<b>1.233.786.700</b>	<b>98,87</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.233.786.700	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.233.786.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.172.700	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.233.786.700</b>	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.233.786.700</b>	-	-



Realisasi Belanja Modal  
Rp0

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja Modal  
Tanah Rp0

#### B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Tanah..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp0

#### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan..

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan..

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Lainnya..

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tidak terdapat Pagu Belanja Sosial..

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Terdapat kas tunai di bank yang belum dilakukan penarikan pada periode pelaporan berupa uang perjalanan dinas pegawai.

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0

#### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak ada Kas Lainnya dan Setara Kas.

Belanja Dibayar Dimuka  
(prepaid) Rp0

#### C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak ada Belanja Dibayar Dimuka.

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

**C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)**

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :  
Tidak ada Uang Muka Belanja.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

**C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :  
Tidak ada Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.

Piutang Perpajakan Rp0

**C.7 Piutang Perpajakan**

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

**C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Pajak</b>			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>			<b>#</b>

Piutang Bukan Pajak Rp0

**C.9 Piutang Bukan Pajak**

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

### C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

### C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

### C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

### C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

### C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR & Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Persediaan Rp0

**C.15 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Persediaan Baik.

**Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19**

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
<b>Jumlah</b>		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

**C.16 Persediaan yang Belum Diregister**

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

**C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

**C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran**

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

**C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya**

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

**C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Properti Investasi Rp0

**C.21 Properti Investasi**

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp0

**C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

**C.23 Tanah**

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada Kenaikan Tanah.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada Tanah digunakan oleh pihak ketiga.

Tanah Belum Diregister  
Rp0

**C.24 Tanah Belum Diregister**

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin  
Rp0

**C.25 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	-

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin.
- 
- 
- 

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin.
- 
- 

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister Rp0

**C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister**

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan  
Rp0

**C.27 Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	-
Pengembangan Nilai Aset	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan.

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan.

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Belum Diregister Rp0

**C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister**

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

**C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan.

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan.

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

**C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

**C.31 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak ada Aset Tetap Lainnya.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada Mutasi Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

**C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister**

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

**C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada KDP. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0*

### C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

*Aset Konsesi Jasa Rp0*

### C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0*

### C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga.. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

*Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025*

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
-		-
-		-
-		-
	<b>Jumlah</b>	-

**C.38 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2025</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. Tidak ada Mutasi Tambah/Kurang ATB.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

**C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada ATB dalam Pengerjaan.. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
<b>Saldo per</b>	-

**C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Tidak ada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

**C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri**

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Tidak ada Dana Cadangan.

**C.42 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Mutasi Tambah**

- Tidak ada Mutasi Tambah Aset Lain-lain.

-

-

**Mutasi Kurang**

- Tidak ada Mutasi Kurang Aset Lain-lain.

-

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister**

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

**C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

**C.45 Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	REALISASI T. A. 2025	REALISASI T. A. 2024
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Terdapat Utang kepada Pihak ketiga lainnya yang belum dibayarkan berupa uang perjalanan dinas pegawai senilai Rp. 11.240.000

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

#### C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak ada Utang Yang Belum Ditagihkan.

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

#### C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
<b>Jumlah</b>	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak ada Hibah Yang Belum Disahkan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

#### C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak ada Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

#### C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

#### C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Tidak ada Uang Muka dari KPPN.

Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0

#### C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T. A. 2025	REALISASI T. A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Konsesi Jasa  
Rp0

#### C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T. A. 2025	REALISASI T. A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Kewajiban Konsesi Jasa.

Ekuitas Rp0

#### C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca



Beban Barang dan Jasa  
Rp1.099.614.000

#### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.099.614.000 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Bahan	19.944.000	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	1.074.270.000	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	5.400.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.099.614.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp0

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp134.172.700

#### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp134.172.700 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	101.362.700	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.810.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>134.172.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Barang Untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0*

**D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial  
Rp0*

**D.9 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Bansos.. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Penyusutan dan  
Amortisasi Rp0*

**D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumah Penyusutan</b>	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0*

**D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp0

#### D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit)  
Penyelesaian  
Kewajiban Jangka  
Panjang Rp0

#### D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya Rp0

#### D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak terdapat Pos Luar Biasa.

#### D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak terdapat Beban Penanganan Covid-19

#### D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

### E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO

Rp.1.233.786.700,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.233.786.700,00 dan Rp.0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0.00

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan  
Rp0,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak terdapat Koreksi atas Reklasifikasi.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih Revaluasi Aset  
Rp.0,00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025*

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain Rp0

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Tidak terdapat Koreksi Lain-lain.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

*Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar Entitas Rp1.233.786.700

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.233.786.700 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

*Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.233.786.700
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.233.786.700</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

##### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 1.233.786.700, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 0

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

*Rincian Transfer Keluar Tahun 2025*

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :*

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir Rp0*

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan data dari Satu DJA Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kode Satker 693116 telah melakukan revisi sebanyak sembilan kali.

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM  
**ESELON I** : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH  
**SATUAN KERJA** : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
 TENGAH

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	1,099,614,000	0	1,099,614,000	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	134,172,700	0	134,172,700	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM  
 ESELON I : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH  
 SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
 TENGAH

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,233,786,700	0	1,233,786,700	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,233,786,700)	0	(1,233,786,700)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,233,786,700)	0	(1,233,786,700)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,233,786,700)	0	(1,233,786,700)	()

---

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH  
NIP. 197310101996031001

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,233,786,700)	0	(1,233,786,700)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,233,786,700	0	1,233,786,700	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

NIP. 197310101996031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM 135  
**ESELON I** : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11  
**SATUAN KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH 693116

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM  
Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>1,680,737,000</b>	<b>1,233,786,700</b>	<b>(446,950,300)</b>	<b>73.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH  
NIP. 197310101996031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 135  
**ESELON I** : 11  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1800  
**SATUAN KERJA** : 693116  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 21/01/26 7:24 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 21/1/26 2:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,671,000	104,785,000	19,944,000	0	19,944,000	19.03	84,841,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,184,000	13,184,000	0	0	0	0	13,184,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	135,655,000	137,769,000	19,944,000	0	19,944,000	14.48	117,825,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,485,400,000	1,087,326,000	1,074,270,000	0	1,074,270,000	98.8	13,056,000
522151	Belanja Jasa Profesi	35,100,000	40,500,000	5,400,000	0	5,400,000	13.33	35,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,520,500,000	1,127,826,000	1,079,670,000	0	1,079,670,000	95.73	48,156,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	325,616,000	324,772,000	101,362,700	0	101,362,700	31.21	223,409,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,040,000	90,370,000	32,810,000	0	32,810,000	36.31	57,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	422,656,000	415,142,000	134,172,700	0	134,172,700	32.32	280,969,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300
	JUMLAH BELANJA	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 135  
**ESELON I** : 11  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1800  
**SATUAN KERJA** : 693116  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 21/01/26 7:24 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 21/1/26 2:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,671,000	104,785,000	19,944,000	0	19,944,000	19.03	84,841,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,184,000	13,184,000	0	0	0	0	13,184,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	135,655,000	137,769,000	19,944,000	0	19,944,000	14.48	117,825,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,485,400,000	1,087,326,000	1,074,270,000	0	1,074,270,000	98.8	13,056,000
522151	Belanja Jasa Profesi	35,100,000	40,500,000	5,400,000	0	5,400,000	13.33	35,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,520,500,000	1,127,826,000	1,079,670,000	0	1,079,670,000	95.73	48,156,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	325,616,000	324,772,000	101,362,700	0	101,362,700	31.21	223,409,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,040,000	90,370,000	32,810,000	0	32,810,000	36.31	57,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	422,656,000	415,142,000	134,172,700	0	134,172,700	32.32	280,969,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300
	JUMLAH BELANJA	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM**

**UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**

**SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH**

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

NIP. 197310101996031001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 135  
UNIT ORGANISASI : 11  
WILAYAH/PROVINSI : 1800  
SATUAN KERJA : 693116

KEMENTERIAN HUKUM  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
SULAWESI TENGAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

*Tgl. Cetak 21/01/2026 7:24 AM*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker\_poc*

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,233,786,700
3.0	521211	Beban Bahan	19,944,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,074,270,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	101,362,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,810,000	0
JUMLAH			1,233,786,700	1,233,786,700

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

NIP. 197310101996031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 7:24 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,233,786,700
3.0	521211	Belanja Bahan	19,944,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,074,270,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,362,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,810,000	0
JUMLAH			1,233,786,700	1,233,786,700

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

197310101996031001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 135  
UNIT ORGANISASI : 11  
WILAYAH/PROVINSI : 1800  
SATUAN KERJA : 693116

KEMENTERIAN HUKUM  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
SULAWESI TENGAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

*Tgl. Cetak 23/02/2026 7:56 AM*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker\_poc*

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM  
**ESELON I** : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH  
**SATUAN KERJA** : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
**TENGAH**

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:46 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	1,099,614,000	0	1,099,614,000	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	134,172,700	0	134,172,700	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM  
**ESELON I** : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH  
**SATUAN KERJA** : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
**TENGAH**

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:46 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1,233,786,700</b>	<b>0</b>	<b>1,233,786,700</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>0</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>()</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>0</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>()</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>0</b>	<b>(1,233,786,700)</b>	<b>()</b>

---

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH  
NIP. 197310101996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:46 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,233,786,700)	0	(1,233,786,700)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,233,786,700	0	1,233,786,700	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH  
NIP. 197310101996031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM 135  
**ESELON I** : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11  
**SATUAN KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH 693116

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM  
Tgl Cetak : 23/02/26 7:46 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>1,680,737,000</b>	<b>1,233,786,700</b>	<b>(446,950,300)</b>	<b>73.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH  
NIP. 197310101996031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 135  
**ESELON I** : 11  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1800  
**SATUAN KERJA** : 693116  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 23/02/26 7:55 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 23/2/26 3:32 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	102,671,000	104,785,000	19,944,000	0	19,944,000	19.03	84,841,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,184,000	13,184,000	0	0	0	0	13,184,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	135,655,000	137,769,000	19,944,000	0	19,944,000	14.48	117,825,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,485,400,000	1,087,326,000	1,074,270,000	0	1,074,270,000	98.8	13,056,000
522151	Belanja Jasa Profesi	35,100,000	40,500,000	5,400,000	0	5,400,000	13.33	35,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,520,500,000	1,127,826,000	1,079,670,000	0	1,079,670,000	95.73	48,156,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	325,616,000	324,772,000	101,362,700	0	101,362,700	31.21	223,409,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,040,000	90,370,000	32,810,000	0	32,810,000	36.31	57,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	422,656,000	415,142,000	134,172,700	0	134,172,700	32.32	280,969,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300
	JUMLAH BELANJA	2,078,811,000	1,680,737,000	1,233,786,700	0	1,233,786,700	73.41	446,950,300



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM**

**UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH**

**SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH**

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:47 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

NIP. 197310101996031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:47 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,233,786,700
3.0	521211	Beban Bahan	19,944,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,074,270,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	101,362,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,810,000	0
JUMLAH			1,233,786,700	1,233,786,700

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

NIP. 197310101996031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 1800 ) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : ( 693116 ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI  
TENGAH

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 7:55 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,233,786,700
3.0	521211	Belanja Bahan	19,944,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,074,270,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,362,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,810,000	0
JUMLAH			1,233,786,700	1,233,786,700

Keterangan :

FINAL

PALU, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RAKHMAT RENALDY, SH. MH

197310101996031001

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-12  
 Kementerian Negara/Lembaga : 135 - KEMENTERIAN HUKUM  
 Eselon 1 : 135.11 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Wilayah/Provinsi : 18.51 - KOTA PALU/SULAWESI TENGAH  
 Satuan Kerja : 693116 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Halaman : 1  
 Tanggal Cetak : 21-01-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1,680,737,000.00	1,233,786,700.00	73.41%							
03	PEMBINAAN HUKUM	1,680,737,000.00	1,233,786,700.00	73.41%							
BB	Program Pembentukan Regulasi	141,851,000.00	14,882,000.00	10.49%							
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	141,851,000.00	14,882,000.00	10.49%							
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	76,027,000.00	14,882,000.00	19.57%							
001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	76,027,000.00	14,882,000.00	19.57%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	1.0000	100%	80.43%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	65,824,000.00	0.00	0%							
001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	65,824,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	100%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,538,886,000.00	1,218,904,700.00	79.21%							
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1,538,886,000.00	1,218,904,700.00	79.21%							
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	70,653,000.00	15,055,900.00	21.31%							
001	Pengelolaan anggota JDH di wilayah	70,653,000.00	15,055,900.00	21.31%	8.0000	Lembaga	8.0000	100%	78.69%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pengelolaan anggota JDH di wilayah

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
<b>BDD</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>	<b>167,237,000.00</b>	<b>56,665,000.00</b>	<b>33.88%</b>							
001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	69,331,000.00	15,000,000.00	21.64%	2.0000	Kelompok Masyarakat	2.0000	100%	78.36%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Layanan penyuluhan hukum di Daerah
002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	97,906,000.00	41,665,000.00	42.56%	15.0000	Kelompok Masyarakat	15.0000	100%	57.44%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
<b>BIB</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>	<b>41,686,000.00</b>	<b>21,023,800.00</b>	<b>50.43%</b>							
001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	41,686,000.00	21,023,800.00	50.43%	1.0000	Orang	1.0000	100%	49.57%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah
<b>BIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>	<b>80,061,000.00</b>	<b>14,440,000.00</b>	<b>18.04%</b>							
001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	80,061,000.00	14,440,000.00	18.04%	16.0000	Lembaga	16.0000	100%	81.96%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah
<b>BMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>60,958,000.00</b>	<b>22,650,000.00</b>	<b>37.16%</b>							
001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	60,958,000.00	22,650,000.00	37.16%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	62.84%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah
<b>FAE</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>30,965,000.00</b>	<b>14,800,000.00</b>	<b>47.8%</b>							
001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	30,965,000.00	14,800,000.00	47.8%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	52.2%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
<b>QBA</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>	<b>946,086,000.00</b>	<b>944,000,000.00</b>	<b>99.78%</b>							
U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	946,086,000.00	944,000,000.00	99.78%	159.0000	Orang	159.0000	100%	0.22%	( 00 )	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
<b>QBC</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat</b>	<b>141,240,000.00</b>	<b>130,270,000.00</b>	<b>92.23%</b>							
U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	141,240,000.00	130,270,000.00	92.23%	20.0000	Kelompok Masyarakat	20.0000	100%	7.77%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

**Penjelasan atas to do list Lainnya**  
**Pengungkapan Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode Persediaan**

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D

**Penjelasan atas masih adanya to do list di monsakti:**

1. Tidak terdapat to do list.

**Penjelasan atas to do list Lainnya**  
**Pengungkapan Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN**

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D

**Penjelasan atas masih adanya to do list di monsakti:**

1. Tidak terdapat to do list.

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BB) Program Pembentukan Regulasi  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah								
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	76,027,000	14,882,000	19.57%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah
	<b>Sub Total</b>	<b>76,027,000</b>	<b>14,882,000</b>	<b>19.57%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>76,027,000</b>	<b>14,882,000</b>	<b>19.57%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BB) Program Pembentukan Regulasi  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah								
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	65.824.000	-	0,00%	1	1	Lembaga	100%	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah
	<b>Sub Total</b>	<b>65.824.000</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Lembaga</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian								
	<b>Total</b>	<b>65.824.000</b>	-	<b>0,00%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	70,653,000	15,055,900	21.31%	8	8	Lembaga	100%	Pengelolaan anggota JDHIN di wilayah
	<b>Sub Total</b>	<b>70,653,000</b>	<b>15,055,900</b>	<b>21.31%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Lembaga</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>70,653,000</b>	<b>15,055,900</b>	<b>21.31%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
7136.BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	69,331,000	15,000,000	21.64%	2	2	Kelompok Masyarakat	100%	Layanan penyuluhan hukum di Daerah
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	97,906,000	41,665,000	42.56%	15	15	Kelompok Masyarakat	100%	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
	<b>Sub Total</b>	<b>167,237,000</b>	<b>56,665,000</b>	<b>33.88%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>mpok Masyar</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>167,237,000</b>	<b>56,665,000</b>	<b>33.88%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat								
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	41,686,000	21,023,800	50.43%	1	1	Orang	100%	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah
	<b>Sub Total</b>	<b>41,686,000</b>	<b>21,023,800</b>	<b>50.43%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Orang</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>41,686,000</b>	<b>21,023,800</b>	<b>50.43%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	80,061,000	14,440,000	18.04%	16	16	Lembaga	100%	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah
	<b>Sub Total</b>	<b>80,061,000</b>	<b>14,440,000</b>	<b>18.04%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>Lembaga</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>80,061,000</b>	<b>14,440,000</b>	<b>18.04%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.BMA	Data dan Informasi Publik								
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	60,958,000	22,650,000	37.16%	1	1	Dokumen	100%	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah
	<b>Sub Total</b>	<b>60,958,000</b>	<b>22,650,000</b>	<b>37.16%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian								
	<b>Total</b>	<b>60,958,000</b>	<b>22,650,000</b>	<b>37.16%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	30,965,000	14,800,000	47.80%	10,000	10,000	Laporan	100%	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
	<b>Sub Total</b>	<b>30,965,000</b>	<b>14,800,000</b>	<b>47.80%</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>Laporan</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>30,965,000</b>	<b>14,800,000</b>	<b>47.80%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	946,086,000	944,000,000	99.78%	159	159	Orang	100%	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
	<b>Sub Total</b>	<b>946,086,000</b>	<b>944,000,000</b>	<b>99.78%</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>Orang</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>946,086,000</b>	<b>944,000,000</b>	<b>99.78%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia  
 Unit Organisasi : (11) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (693116) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah  
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan  
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum  
 Program : (BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah								
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat								
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	141,240,000	130,270,000	92.23%	20	20	Kelompok Masyarakat	100%	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
	<b>Sub Total</b>	<b>141,240,000</b>	<b>130,270,000</b>	<b>92.23%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok Masyaraka</b>	<b>100%</b>	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	<b>Total</b>	<b>141,240,000</b>	<b>130,270,000</b>	<b>92.23%</b>					

\*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

## Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada **Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Satker 693116** tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

### 1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

### 2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-



**6. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp.0** dan realisasi sebesar **Rp.0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

<b>Program / Kegiatan Prioritas</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Satuan Output</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>%</b>
-	-	-	-	-	-	-	-

**7. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut

Kementerian/Lembaga:

<b>Program / Kegiatan Prioritas</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Satuan Output</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>%</b>
-	-	-	-	-	-	-	-

**8. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

<b>Program / Kegiatan Prioritas</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Satuan Output</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>%</b>